

SKRIPSI
PELAKSAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS TATA RUANG
DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU DALAM
PEMBANGUNAN PEMUKIMAN DI
KOTA PEKANBARU



OLEH :

MASNUR

10576002666

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA SI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2010

ABSTRAK

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU DALAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh :
Masnur

Hingga saat ini, dapat kita perhatikan pembangunan permukiman yang direalisasikan. Dimana pembangunan permukiman harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Daerah Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi Riau, merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan kota yang tinggi, tingkat urbanisasi yang pesat dan memiliki kecenderungan untuk berkembang sebagai kawasan metropolitan. Perjalanan pelaksanaan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru selama ini, berupa pembangunan perumahan permukiman, pembangunan prasarana, jalan, pengembangan sumberdaya air dan irigasi, serta pengembangan prasarana perkotaan dan pedesaan telah banyak membawa perubahan baik fisik ekonomi maupun sosial budaya di tengah-tengah masyarakat, meskipun pada esensinya belum dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Dalam perkembangannya, pembangunan permukiman tepatnya di Kota Pekanbaru masih dinilai belum optimal. Pembangunan kawasan permukiman di Kota Pekanbaru selama ini mengalami banyak persoalan yang rumit. Seperti kelemahan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan permukiman yang profesional dan proporsional. Hal ini mengingat bahwa daerah geografis Kota Pekanbaru tidak hanya terdiri dari daerah dataran saja, melainkan juga terdiri dari kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tentu berimplikasi pada orientasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam perancangan pembangunan permukiman yang peduli lingkungan, maka banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan pengawasan yang ketat dalam pembangunan permukiman. Karena apabila pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah lemah, maka akan terjadi kecenderungan penyimpangan pembangunan permukiman diluar prosedur dan aturan yang berlaku. Salah satu dampaknya adalah terjadi pembangunan permukiman liar yang tidak memperhatikan aspek ekologi yang ada.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam pembangunan permukiman. Metodologi digunakan adalah deskriptif kualitatif, studi ini memusatkan perhatian pada masalah/fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, yang bersifat aktual, yang kemudian digambarkan realita tentang masalah yang diamati dengan interpretasi rasional yang jelas dan kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Tata Ruang dan bangunan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak terdapat persoalan yang perlu ditangani, seperti persoalan pengawasan internal kepada pegawai yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal dan kualitas hasil pelaksanaan pembangunan permukiman belum sepenuhnya memperhatikan faktor ekologi dan ekosistem yang ada. Namun, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Key word : fungsi pengawasan, pembangunan permukiman, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah....*tiada puji-pujian yang pantas disanjung kepada sesuatu selain Allah, karena pujian hanya milik Allah *Subhanahu Wata'ala*. Tiada santunan terima kasih yang suci kepada sesuatu selain Dia, karena manusia diciptakan secara *insyaf* dengan sempurna. Tiada pernah sedetikpun manusia hidup tanpa nikmat-Nya, tiada pernah sedetikpun manusia hidup tanpa seizin-Nya, tiada pernah sedetikpun manusia hidup tanpa lepas dari penglihatan-Nya, karena dalam setiap ketiadaan-Nya dalam kehidupan ini manusia tidak akan pernah berdaya, tidak akan pernah tenang, jika mengalfakan Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam tiap sendi kehidupan. Hanya pada Allah *Subhanahu Wata'ala* kita bersandar, berserah diri sepenuhnya, memohon keridhoan dan barokah dari-Nya.

Hamdan Katsir, penulis persembahkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kekuatan, kemampuan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "***Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru***", meskipun dalam segala kesederhanaan yang jauh dari kesempurnaan hakiki.

Selanjutnya, sholawat beriring salam yang tiada pernah luput dalam kehidupan ini, teruntuk tokoh revolusioner yang sangat berjasa dalam peradaban manusia, memberikan titik terang bagi semesta alam, yaitu Nabi Muhammad *Shollallohu 'alaihi Wasallam*. Yang telah berjuang keras demi terwujudnya *Izzul Islam Wal-Muslimin* dan tegaknya *Kalimatul Haq* dan peradaban yang mulia diatas jagad raya ini.

Skripsi ini merupakan sarana bagi setiap mahasiswa untuk menguji kebenaran antara teoritis dan praktis yang dihiasi dengan faktualisasi kepentingan individu, kelompok kepentingan, dan dibungkus dengan *kamufase* yang sistematis. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik waktu, tenaga, pikiran, saran, dan kritik, dari semua pihak yang berkompeten dan begitu dedikatifnya demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi baik bersifat material maupun spritual terutama kepada :

1. Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta, suatu kebanggaan yang tidak bisa diukirkan melalui kata-kata untuk menggambarkan rasa cinta dan sayang. Pertalian kasih yang abadi dengan cinta yang tulus dan suci. Inginku bersimpuh dihadapanmu, sebagai tanda ketidakmampuan ku tanpamu. Inginku menatap syahdu senyum keikhlasan darimu, sebagai tanda bahwa kubangga dididik untuk memaknai sebuah cinta dan ketulusan. Inginku mencium dan memegang erat tanganmu, sebagai tanda kuabadikan tiap perjuangannmu untuk ku. Inginku memelukmu...mendekapmu dengan penuh cinta, sebagai tanda bahwa anakmu ini tak pernah berdaya apabila jauh darimu, setiap kerinduan yang melingkar indah dihati kan kupatrikan tepat dihatiku. Inginku menghapus air matamu, sebagai bukti bahwa ananda takkan pernah bisa tuk membalas segala jasamu..sungguh mulia dirimu...ibu dan Ayahku. Terima kasihku atas setiap butir nasi yang menghilangkan laparku, sungguh itulah keringatmu. Terima kasihku atas setiap tetes air yang menghilangkan dahagaku, sungguh itulah air

matamu. Semuanya kau berikan untuk anakmu ini, tiada pernah terlintas pamrih sedikitpun.

Namun, ku yakin bahwa Allah *Subhanahu Wata'ala* akan memberikan tempat yang terbaik untuk mu, sebagai hamba terbaik yang pernah dilahirkan didunia.

Untuk mu Ibunda dan Ayahanda...perjuangan ini kupersembahkan.

2. Kepada Bapak. Drs. Azwar Harahap, MSi. selaku Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri.
3. Bapak Drs. Almasri, MSi. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri..
4. Kepada bapak Rusdi, MA sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara
5. Bapak Dr. Herdi Salioso, M.A, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingannya.
6. Kepada seluruh Staff Pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN, terima kasih atas setiap bantuan dan pengetahuan selama penulis menjalani studi di UIN.
7. Pak Dr. Ir. H. Firdaus, CES selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, atas kerjasamanya memberikan segala informasi yang menunjang penelitian penulis.
8. Untuk *my family's*....adik2kuRobi,Raples,Karimah
9. Khusus untuk *sayangku Nurwaleily*...kan kuperjuangkan cintamu untuk meraih kebahagiaanku..karena ku tahu setelah kehadiranmu ku takkan bisa memaknai senyumku, memaknai setiap rasa dihatiku...s'mangat, cinta, dan kasih yang telah kau berikan akan kuhargai dengan kebahagiaanmu...meski ku tak mampu tapi ku perjuangkan untukmu...

10. Sahabatku..., Marief *ntah apo lah yang terjadi klo ndak ado konco, mokasi banyak nco*, M.Nur, Ade Minur, Agus Ulin, dewi, Eko, dodu, dadang, rais, qorie yang selalu memberikan bantuannya buat skripsi ini, Khususnya Nuke Septemberiana yang slalu memberikan semangat dan motivasinya (*moga sukses slalu..dalam gapai cita dan cinta, aku gk bakal nglupain tiap detik kebersamaan kita*), , *Our is The bestfriends.....*
11. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya stambuk 2004 yang telah berjuang bersama menempuh berbagai hala dan rintangan, semoga apa yang telah kita lakukan akan mendapatkan hasil yang setimpal pula.....
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan secara detil, makasih atas semua bantuan, baik berupa ide, maupun dorongan spirit kesuksesan yang akhirnya peneliti tempuh hingga selesainya tulisan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagai manusia biasa tak luput dari kekhilafan dan kekurangan, kepada semua penulis mohon maaf. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan serta sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan ganjaran yang berlipat atas semua bantuan dari seluruh pihak. Kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* kita berserah, semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis sendiri tetapi juga para pembaca serta bisa menjadi suatu referensi dan masukan bagi peneliti-peneliti dalam kajian yang sama kedepannya.

Pekanbaru, 8 Juni 2010

Penulis,

MASNUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1. Kerangka Teori	11
2.1.1. Pengawasan	11
2.1.2. Pembangunan Pemukiman	26
2.2. Definisi Konsep	31
2.2.1. Pengawasan	31
2.2.2. Pembangunan Pemukiman	31
2.3. Definisi Operasional	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Bentuk Penelitian	34
3.2. Lokasi & Waktu Penelitian	34
3.3. Populasi dan Sampel	34
3.4. Teknik Pengumpulan Data	36
3.5. Teknik Analisa Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1. Sejarah Kantor Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru	38
4.2. Visi dan Misi Kantor Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru ...	39
4.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	39

4.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	41
4.5. Jumlah dan Komposisi Pegawai	43
BAB V ANALISA DATA	45
5.1. Identitas Informan	45
5.1.1. Informan Pemerintah	45
5.1.2. Informan Masyarakat	47
5.2. Distribusi dan Analisa Jawaban Informan	49
5.2.1. Akurat	50
5.2.2. Tepat Waktu	52
5.2.3. Objektif dan menyeluruh	53
5.2.4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik	54
5.2.5. Realistik dan ekonomis	55
5.2.6. Realistik secara operasional	56
5.2.7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi	58
5.2.8. Fleksibel	60
5.2.9. Berfungsi sebagai petunjuk dan operasional	60
5.2.10. Diterima para anggota organisasi	62
5.2.11. Kualitas hasil pelaksanaan pembangunan	65
BAB VI PENUTUP	70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan diantaranya "...membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...", Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) menegaskan setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika dianalisis, maka negara Indonesia meletakkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan (Bab II Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004)

Pembangunan berkelanjutan merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan (Hardjasoemantri, 1995 : 18-19). Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta

dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat (Syahrin, 1999 : 27).

Salah satu sektor pembangunan yang harus mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan permukiman. Dimana permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, disamping kebutuhannya akan pangan dan sandang.

Pembangunan permukiman akan terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan ekonomi, sosial, budaya yang berkembang. Selain itu dalam skala besar pembangunan permukiman dapat merubah alam, merubah geografi dan berdampak luas terhadap manusia dari alam lingkungannya, bahkan dapat mengganggu keseimbangan lingkungan (Syahrin, 1992 : 1).

Selanjutnya, pembangunan permukiman diarahkan kepada peningkatan penyediaan perumahan yang memadai dan terjangkau daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah serta terwujudnya pola permukiman yang seimbang serta layak huni dengan prinsip mengutamakan swadaya dan gotong royong serta dengan memperhatikan rencana tata ruang, keterpaduan dengan lingkungan sosial, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup (Komaruddin, 1997 : 10-11).

Untuk dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal, maka penggunaan sumber daya dalam pembangunan permukiman harus diperhatikan kemampuan dan peruntukannya. Artinya, perlu diperhatikan pelestarian fungsi lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Pembangunan permukiman berskala besar harus ditangani secara terpadu. Tidak ditanganinya secara terpadu dalam pembangunan permukiman dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, diantaranya terjadinya banjir dan kelangkaan air bersih yang timbul akibat perubahan struktur kawasan yang kurang bijaksana, tercemarnya sungai dan tanah oleh limbah domestik, kerawanan sosial dan sebagainya. Keberhasilan usaha-usaha pembangunan permukiman guna memecahkan tekanan kebutuhan penduduk pada tanah/lahan dan ruang serta permukiman secara dinamis akan menentukan bagi keberhasilan peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas lingkungan hidup manusianya. (Dudianarjo dan Sujarto, 1999) : 215-217).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUP LH) dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya, Pasal 3 UUP LH menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Permukiman (selanjutnya disebut UUP P), menyebutkan bahwa penataan permukiman

berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Menyimak ketentuan tersebut, maka permukiman di masa depan harus menjadi bagian iklim kehidupan yang sehat secara lingkungan, ekonomi, sosio-budaya dan politik, yang dapat menjadi sasaran pembinaan generasi muda, dan menjamin berlanjutan peningkatan kualitas kehidupan bagi semua orang (Parlindungan, 1994 : 150). Permukiman bukan sarana pendorong terciptanya segregasi yang menuju disintegrasi seperti sekarang ini, tetapi sebaliknya, permukiman harus dapat memperkuat kesetaraan manusia dan rasa kesatuan bangsa. Karena itu keterpaduan sosial dan kelestarian sumberdaya alam akan menjadi landasan pokok bertindak.

Permukiman merupakan suatu kesinambungan ruang kehidupan dari seluruh unsurnya, baik yang alami maupun non alami, yang saling mendukung dan melindungi, secara fisik, sosial dan budaya. Keanekaragaman kondisi sosio-budaya, sosio-ekonomi, dan fisik, serta dinamika perubahannya akan menjadi dasar pertimbangan utama pengelolaan dan pengembangan permukiman, tidak untuk memisah-misalkannya, melainkan untuk saling berintegrasi secara sosial maupun fungsional, agar semua orang itu dapat hidup secara lebih sejahtera dan saling menghormati, mempunyai akses terhadap prasarana dasar dan pelayanan permukiman yang sesuai secara berkeadilan, dan mampu memelihara serta meningkatkan kualitas lingkungannya. Tujuan pembangunan permukiman adalah untuk melakukan integrasi sosial, ekologis, dan fungsional, yang menjamin peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan (Hardjasoemantri, 1995 : 58).

Dalam struktur kota yang berkelanjutan, porsi permukiman menduduki peringkat yang paling atas, baik dalam luas kawasan, maupun pengaruh yang ditimbulkan terhadap kinerja kota (Budiharjo dan Sujarto, 1999 : 226-227).

Permukiman baru harus menghindari terjadinya *ke-eksklusivan* yang dapat menjadi sarana pendorong terciptanya segregasi yang menuju disintegrasi sebagaimana terlihat saat ini. Permukiman baru menciptakan kesetaraan manusia dan rasa kesatuan bangsa, dengan landasan pokok bertindak keterpaduan sosial dan kelestarian sumberdaya alam.

Begitu urgennya permukiman dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah selaku *policy making* (pembuat kebijakan) melakukan upaya-upaya yang konstruktif dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman secara arif. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah mengenai pembangunan permukiman. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kebijakan hukum penataan ruang yang mengandung dimensi pembangunan multi sektoral dan multi dimensi. Salah satu sektor yang diamanatkan oleh kebijakan hukum penataan ruang adalah pembangunan permukiman yang terarah dan memperhatikan aspek ekologi serta pemanfaatan ruang. Hingga saat ini, dapat kita perhatikan pembangunan permukiman yang direalisasikan. Dimana pembangunan permukiman harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

Daerah Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Propinsi Riau, merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan kota yang tinggi, tingkat urbanisasi yang pesat dan memiliki kecenderungan untuk berkembang sebagai kawasan

metropolitan. Perjalanan pelaksanaan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru selama ini, pembangunan perumahan permukiman, pembangunan prasarana, jalan, pengembangan sumberdaya air dan irigasi, serta pengembangan prasarana perkotaan dan pedesaan telah banyak membawa perubahan baik fisik ekonomi maupun sosial budaya di tengah-tengah masyarakat. (www.bangrusli.net, *Sambutan Gubri Pada Rakor Regional Kimpraswil se Sumatera*, berita, 4 Januari 2008, akses: tanggal 20 November 2008).

Dalam perkembangannya, pembangunan permukiman tepatnya di Kota Pekanbaru masih dinilai belum optimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh M. Rusli Zainal yang menyatakan bahwa:

"Hasil pembangunan selama ini tidak kita pungkiri telah membawa manfaat yang besar kepada masyarakat. Namun kita juga harus mengakui dengan jujur bahwa masih banyak kelemahan yang kita lakukan dalam pembangunan akibat lemahnya fungsi manajemen pembangunan yang mencakup perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan pembangunan. Pembangunan Daerah merupakan bagian integral pembangunan nasional yang di laksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat di daerah secara merata dan berkelanjutan". (www.bangrusli.net)

Pembangunan kawasan permukiman di Kota Pekanbaru selama ini mengalami banyak persoalan yang rumit. Seperti kelemahan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan permukiman yang profesional dan proporsional. Hal ini mengingat bahwa daerah geografis Kota Pekanbaru tidak hanya terdiri dari daerah dataran saja, melainkan juga terdiri dari kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tentu berimplikasi pada orientasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam perancangan pembangunan permukiman yang peduli lingkungan, maka hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah dilaksanakan

fungsi pengawasan yang ketat dalam pembangunan permukiman. Karena apabila pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah lemah, maka akan terjadi kecenderungan penyimpangan pembangunan permukiman diluar prosedur dan aturan yang berlaku. Salah satu dampaknya adalah terjadi pembangunan permukiman liar yang tidak memperhatikan aspek ekologi yang ada.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Ikhsan, bahwa:

"pembangunan di catchment area Sungai Sail kurang memperhatikan aspek lingkungan. Daerah yang rendah dan menjadi tempat genangan air ditimbun, juga banyak sungai-sungai kecil yang ditimbun untuk pemukiman dan perluasan. Akibatnya air yang mengalir di permukaan (run-off) meluapi sungai, sedang air yg meresap ke dalam tanah makin sedikit" (Koran Riau Pos, *M Hapiz dan Erwan Sani*, Sungai Sail Semakin Menyempit, Edisi Ahad, tanggal 9 april 2008, hal.1).

Terjadinya hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kelemahan pemerintah dalam mengakomodir serta memantau implementasi dari pembangunan permukiman yang telah direncanakan sebelumnya (www.bangrusli.net.)

Dari beberapa fenomena yang terjadi, penulis mengamati bahwa telah terjadi kesenjangan antara pembangunan permukiman dengan prinsip *sustainability*. Pembangunan permukiman yang tidak memperhatikan aspek ekologi, justru akan berimplikasi pada keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat prospek depan. Dimana hal serupa juga diakui oleh Gubernur Riau bahwa mekanisme pelaksanaan kebijakan permukiman yang belum dilaksanakan dengan baik, menjadi salah satu kelemahan dari pembangunan permukiman di Propinsi Riau pada umumnya. Seperti mekanisme pengawasan yang seharusnya dilaksanakan secara efektif oleh aparat yang

berwenang untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pembangunan dari apa yang telah dirumuskan sebelumnya, belum dilaksanakan dengan baik, sehingga banyak terjadinya pembangunan “permukiman liar” (pembangunan diluar perencanaan pemerintah).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjut terkait persoalan tersebut. Adapun judul dalam penelitian ini adalah *“pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru”*.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah: “bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam pembangunan permukiman?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara subjektif, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam menganalisis permasalahan lapangan.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan lokasi penelitian..

BAB V : Penyajian dan Analisa Data

Penyajian dan Analisa data berisikan pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam Pembangunan Permukiman di Kota Pekanbaru.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang konstruktif bagi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengawasan

Pengawasan adalah urutan langkah terakhir dalam administrasi pembangunan. Kalau suatu rencana pembangunan tidak memerlukan perbaikan (revisi) dalam pelaksanaannya dan organisasi pelaksana yang dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang dapat bekerja dengan efektif dalam menjalankan rencana tersebut maka pengendalian dan pengawasan tidak diperlukan. Tetapi dalam banyak hal walaupun suatu rencana proyek pembangunan sudah diperhitungkan dengan data dan ramalan-ramalan yang akurat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar, yaitu dijumpai penyimpangan-penyimpangan, dari rencana semula. Penyimpangan ini mungkin disengaja karena kondisi lapangan tidak memungkinkan. Misalnya harus membangun SD yang terbuat dari tembok dan beton bertulang, tetapi karena di daerah terpencil bahan tersebut tidak ada maka dibangun dari kayu. Disamping itu, penyimpangan tersebut mungkin tidak disengaja karena ketidakpahaman dalam membaca rencana dan menerjemahkannya ke dalam pelaksanaan, akibatnya bisa fatal seperti gedung ambruk.

Pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin

agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap kerah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional, disebut lepas *pengawasan*. (Kataren, 2007:63)

Dengan demikian, melalui pengawasan dapat diawasi sejauhmana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang. Jadi, keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karenanya diperlukan kriteria, norma, standar, dan ukuran.

Henry Fayol berpendapat bahwa pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi (Fremont, 1990 : 729).

Dalam praktek kita lihat kegagalan suatu rencana atau aktivitas bersumber pada dua hal, yaitu:

- a. Akibat pengaruh diluar jangkauan manusia (*force major*).
- b. Pelaku yang mengerjakannya tidak memenuhi persyaratan yang diminta.

Penguawasan mempunyai beberapa arti, seperti: mengecek dan memeriksa, mengatur, membandingkan dengan suatu standar, melaksanakan wewenang, mengekang atau mengendalikan (Fremont, 1990 : 730).

Penguawasan (*monitoring*) pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi suatu kegiatan/proyek. Monitoring dilakukan

ketika sebuah program sedang di implementasikan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu proyek, sejauhmana proyek tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. *Monitoring* diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi suatu proyek yang akan datang supaya aplikasi proyek pada masa mendatang akan lebih baik (Subarsono, 2005 : 113).

Pengawasan juga merupakan tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang di izinkan dan yang diukur dari harapan-harapan. Pengawasan organisasi berkaitan erat dengan perencanaan. Rencana memberikan kerangka bagi bekerjanya proses pengawasan. Sebaliknya, *feedback* dari tahap pengawasan itu seringkali mengidentifikasi kebutuhan akan rencana atau strategi baru yang disesuaikan. Unsur dasar dari proses pengawasan adalah sama untuk setiap individu atau organisasi. Alat-alat yang dipakai untuk mengatur kegiatan-kegiatan tersebut biasanya berbeda-beda menurut keadaan. Biasanya, perilaku individu dan organisasi itu dituntun oleh urutan yang *continue* dari siklus perencanaan-pelaksanaan-pengawasan (Fremont, 1990 : 729).

Maka pengawasan dapat dikatakan sebagai proses, dimana pihak manajemen melihat apakah yang telah terjadi relevan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila tidak demikian halnya, maka diadakan penyesuaian-penyesuaian yang seharusnya dilakukan. Pengawasan berhubungan dengan persoalan-persoalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana yang sebelumnya dibuat.
- b. Mengadakan koreksi-koreksi yang perlu dilakukan apabila kejadian-kejadian dalam kenyataan ternyata menyimpang dari perencanaan.

Adapun faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan sebagai berikut:

- a. Sasaran-sasaran individual dan organisatoris biasanya berbeda, maka dengan demikian diperlukan pengawasan untuk memastikan bahwa anggota bekerja ke arah sasaran organisatoris.
- b. Pengawasan diperlukan disebabkan oleh karena terdapat adanya suatu keterlambatan antara waktu sasaran-sasaran dirumuskan dan sewaktu implementasi sasaran-sasaran tersebut.

Pengendalian dan perencanaan keduanya disebut "*pengawasan*" yaitu berkenaan dengan dua hal:

- a. Membanding-bandingkan apa yang telah dibuat dengan rencana semula.
- b. Mengambil tindakan dalam perbaikan (korektif) apabila yang terjadi tersebut menyimpang dari rencana semula.

Pengendalian lebih bersifat langsung dan dilakukan ketika pelaksanaan suatu proyek sedang berjalan yaitu usaha untuk mengarahkan pelaksanaan proyek supaya tidak menyimpang dari rencana semula. Dalam hal ini pengendali harus aktif bertindak setiap saat melihat penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan. Misalnya seharusnya dipasang paku beton tetapi oleh pemborong dipasang paku kayu atau paku biasa, pengendali menyuruh tukar. Pengendalian ini lebih banyak

dilakukan oleh petugas lapangan yang ditunjuk dan sehari-hari mengikuti jalannya pelaksanaan proyek dan dapat bertindak langsung kalau terjadi penyimpangan.

Pengawasan biasanya dilakukan secara berkala dan ketika suatu proyek selesai sebagian atau seluruhnya, pengawas mencatat penyimpangan yang terjadi dan membuat laporan yang disampaikan kepada yang berwenang. Selanjutnya berhak mengambil tindakan korektif adalah pejabat yang berwenang tersebut dan bukan para pengawas. Jadi pengawasan ini walaupun dilakukan di tempat kejadian namun tindakannya tidak langsung tetapi harus melalui orang-orang yang berwenang mengambil tindakan. Para pengawas adalah mereka yang memang fungsinya sebagai pengawas atau menempati posisi tertentu dalam organisasi, misalnya Inspektorat Jenderal, Inspektur dan lain-lain.

Jadi, pengendalian dan pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang harus terjadi. Oleh sebab itu kegiatan tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa melihat dan memahami suatu rencana semula. Dengan kata lain, pengendalian dan pengawasan harus berpedoman pada perencanaan.

Monitoring atau pengawasan adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu proyek kebijakan yang sedang diimplementasikan dengan tujuan:

- a. Menjaga agar proyek yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- b. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.

- c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap proyeksi kebijakan pembangunan apabila hasil *monitoring* mengharuskan untuk itu.

Tolak ukur yang dipakai dalam pengawasan ialah sebagai berikut:

1. Standard fisik/normalisasi *physical standard*, dengan memperhatikan tiga hal berikut:
 - a. Kualitas hasil produksi.
 - b. Kuantitas hasil produksi.
 - c. Waktu penyelesaian.
2. Standard nonfisik (*intangible standard*).

Tolak ukur dengan standar nonfisik seperti hal-hal yang dapat dirasakan, tapi tidak dapat dilihat dan digunakan (Subarsono, 2005 : 114).

Handoko mengatakan karakteristik pengawasan sebagai berikut (Handoko, 1994 : 373-374):

1. Akurat.

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Objektif dan menyeluruh

Informasi harus bersifat objektif dan mudah dipahami.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan berakibat fatal.

5. Realistik dan ekonomis

Pengawasan yang dilakukan harus relevan dengan fakta yang ada, serta berprinsip ekonomis sehingga dapat tercapai efisiensi.

6. Realistik secara operasional

Sistem pengawasan harus sesuai atau harmonis dengan kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Hal ini dibutuhkan karena setiap tahun dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang membutuhkannya.

8. Fleksibel

Untuk memberikan tanggungan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungannya.

9. Berfungsi sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10. Diterima para anggota organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengesahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggungjawab, dan prestasi.

11. Kualitas hasil pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan keberlangsungan ekosistem yang ada, baik lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kemudian pengawasan yang dilakukan juga bertujuan untuk menjaga agar proyek pembangunan relevan dengan tujuan dan sasaran.

Monitoring membutuhkan data dan informasi sebagai bahan melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode antara lain:

1. Metode dokumentasi.

Yaitu dari berbagai laporan kegiatan, seperti laporan tahunan, laporan semesteran, atau laporan bulanan.

2. Metode survei.

Dalam hal ini, seperangkat instrument pertanyaan dipersiapkan sebelum melakukan survei. Tujuan survey adalah untuk menjaring data dari para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran pembangunan.

3. Metode observasi lapangan

Observasi dimaksudkan untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari perencanaan. Metode ini dapat digunakan untuk melengkapi metode survei.

4. Metode wawancara dengan para *stakeholders*

Untuk metode ini, pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perencanaan perlu dipersiapkan.

5. Metode campuran dari berbagai metode yang ada

Misalnya antara metode dokumentasi dan survai, atau metode survai dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode tersebut diatas.

6. *Focus Group Discussion (FGD)*.

Dewasa ini berkembang metode FGD yaitu dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para kelompok kepentingan yang variatif. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check data* dan informasi dari berbagai sumber.

Kalau kita membangun berarti kita melakukan perubahan yang mungkin tetap dan mungkin berkembang. Kalau perubahan tetap misalnya meruntuhkan atau memperbaiki rumah lama dan membangun kembali seperti sedia kala, sedangkan pembangunan berkembang yaitu meruntuhkan bangunan lama yang hanya satu tingkat dan membangun kembali dengan banyak tingkat. Jadi, dalam pembangunan itu tidak selalu terjadi peningkatan dan perkembangan tetapi perubahan tentu terjadi, yang dikehendaki adalah terjadinya perubahan, perkembangan, dan peningkatan dalam suatu pembangunan.

Kalau terjadi perubahan, perkembangan dan peningkatan berarti kondisi lingkungan yang semula tenang menjadi terganggu. Misalnya suatu desa selama

ini tenang, aman dan nyaman lingkungannya. Tetapi dipinggir desa dibangun pabrik bata, maka terjadilah hangar bingar dan desa tersebut dikenai polusi debu. Akibatnya rakyat desa menjadi cemas dan terganggu kesehatannya sehingga mereka banyak yang mengungsi, akhirnya mereka menuntut kepada pemerintah untuk menanggulangi keadaan segera.

Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai tukang pengawasan (*pengawasanser*) dan dalam mengambil tindakan perbaikan harus berpedoman bagaimana pabrik bata tetap jalan demi pembangunan dan bagaimana keseimbangan masyarakat desa yang terganggu dapat dikembalikan. System yang demikian disebut *cybernetik*, yaitu bagaimana system dinamik itu dapat memelihara keseimbangan dan ketenangan, sungguhpun terjadi perubahan kondisi lingkungan, misalnya tindakan pemerintah sebagai *pengawasanser* itu mewajibkan pabrik batu meredam polusinya yang mencemari desa dan mengembalikan masyarakat desa merasa aman dan tenteram di desanya.

Sibernetika adalah sebuah konsep penting bagi fungsi pengawasan. Perkataan ini berasal dari bahasa Yunani; *kybernetes*, atau pengendali. Jadi, mempunyai konotasi mengarahkan. Sibernetika menyangkut komunikasi dan pengawasan. Ia berkenaan dengan arus informasi dalam sistem yang kompleks. Walaupun sibernetika terutama diterapkan untuk masalah rekayasa yang mekanistik, namun model umpan-baliknya, pengawasan, dan pengaturannya juga penting untuk sistem biologis dan sosial. Contoh pengemudi ini menunjukkan konotasi terpenting dan berguna tentang fungsi pengawasan-memelihara arah-jalan menuju suatu sasaran (Fremont, 1990 : 732).

Dalam pembangunan dinegara berkembang, sistem sibernatik dalam pengawasan ini pula digalakkan, misalnya di Indonesia dapat terlihat dari kebijaksanaan pemerintah yaitu pembangunan harus ditingkatkan, tetapi kondisi lingkungan tetap dipelihara, kestabilannya seperti menjamin kelestarian alam. Jadi, kalau diikuti sistem sibernatik dalam *pengawasan* ini maka ada empat hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Ada ketetapan terlebih dahulu bahwa ketentraman dan keseimbangan lingkungan dipelihara.
2. Diatas segalanya itu terjadi perubahan-perubahan secara kontinu dalam lingkungan dimana sistem itu berlaku, tetapi harus diusahakan penyesuaian dalam system tersebut dalam memelihara kestabilan. System yang demikian disebut "*dynamic system*".
3. Terjadinya penyaluran informasi dari lingkungan (luar sistem) kedalam sistem.
4. Harus ada alat mekanis yang dirancang untuk mengambil tindakan koreksi sehingga hasilnya dapat memelihara kestabilan sistem.

Dalam pengertian sistem sibernatik ini, semua kehidupan organisme harus dijaga keseimbangannya supaya tetap bertahan hidup (*survive*).

Pada umumnya orang sepakat bahwa dalam proses *pengawasan* ini ada beberapa langkah yang harus diikuti yaitu:

1. Menetapkan suatu standar yang mana menjadi ukuran dalam pelaksanaan standar ini dapat berupa lukisan, dan dapat berupa program.

2. Mengukur apa yang telah dilaksanakan dengan menghubungkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Kalau terjadi perbedaan antara apa yang ditetapkan dalam standar dengan apa yang dilaksanakan maka selisih tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengambil tindakan korektif.

Kalau kita terapkan langkah-langkah proses *pengawasan* ini dalam sistem sibermatik maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penetapan standar berarti membatasi pada keseimbangan yang di ingini. Standar ini dapat berupa sasaran dalam unit-unit organisasi yang di ingini untuk dicapai. Tetapi dalam pembangunan sasaran itu berupa program yang tidak tetap atau selalu berubah-ubah sesuai dengan kehendak masyarakat atau apa yang diperkirakan pemerintah bermanfaat bagi masyarakat.
2. Dalam mengukur atau menilai tingkat pelaksanaan suatu proyek diperlukan data, informasi yang telah diproses dan diterjemahkan sehingga kesimpulan dapat diambil tentang pelaksanaan proyek tersebut apakah sesuai atau tidak dengan sasaran yang ditentukan. Data dan informasi yang dikehendaki adalah yang mengangkat segala sesuatu yang berkenaan proyek yaitu dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, demografi, ekologi, keamanan, dan lain-lain.

Ada lima tahapan pengawasan (Handoko, 1994 : 375), yaitu:

1. Penetapan standar
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Pada prinsipnya pengawasan itu terbagi 2 yaitu :

a. Pengawasan dari dalam

Seperti yang telah di kemukakan bahwa pengelolaan pembangunan adalah organisasi pemerintah. Demikian pula dalam hal pengawasannya juga dilakukan oleh organisasi pemerintah. Pengawas utama adalah kepala eksekutif yang berkedudukan sebagai pejabat politik dan sekaligus kepala birokrasi, misalnya menteri dalam suatu departemen. Dalam pengawasan ini eksekutif di bantu oleh staf yang di bentuk baik secara struktural maupun nonstruktural. Kalau di Indonesia staf pengawas adalah inspektorat jendral, sedangkan yang non adalah misalnya berbagai staf mentri.

Pengawasan yang dilakukan oleh staf tersebut adalah pengawasan fungsional. Di samping itu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, misalnya direktur jendral adalah pengawas dari para direktur yang berada di bawahnya. Pengawasan demikian melekat pada dirinya sebagai pejabat dalam birokrasi pemerintah.

Baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat hanya berlaku pada organisasi kedalam. Hanya saja pengawasan fungsional tidak dapat mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang di temui dalam pengawasan yang dilakukan, mereka hanya memberikan laporan dan kepala eksekutif yang dapat mengenakan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh bawahannya. Khusus dalam hal pembangunan, pengawasan tersebut berlaku secara kait-mengait, karena

pembangunan yang dilakukan di negara berkembang pada umumnya bersifat pembangunan terpadu. Pengawasan *intern* dalam perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian pengawasan perusahaan (*internal auditor*).

b. Pengawasan dari luar (*Ekstern*)

Pengawasan *ekstern* dilakukan oleh akuntan publik. Publikasi laporan neraca dan rugi-laba yang menyebabkan jalannya organisasi wajib diperiksa oleh akuntan publik. Biasanya pada rapat pemegang saham laporan keuangan dan pertanggungjawaban Direktur dibicarakan, juga ditetapkan akuntan mana yang memeriksa laporan organisasi tersebut.

(a). Pengawasan legislatif

Badan legislatif adalah suatu badan yang berhak mengawasi terhadap realisasi pembangunan maupun dananya. Untuk keperluan tersebut lembaga legislatif akan membentuk komisi-komisi anggaran untuk membicarakan dengan pihak pemerintah baik sebelum menyusun anggaran maupun sesudah pelaksanaan anggaran, sesuai dengan penelitian yang di lakukannya. Walaupun demikian, dalam prakteknya badan legislatif mengalami hambatan-hambatan karena kekurangan keahlian yang di butuhkan secara teknis dalam memeriksa keuangan, akibatnya pemeriksaan tersebut hanya berupa kulit-kulit luar saja.

(b). Pengawasan dari lembaga lainnya

Kurangnya efektifitas pengawasan yang di lakukan dari dalam maka di buat suatu badan pengawasan yaitu lembaga badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP). Sasaran pengawasannya sama yaitu proyek dana pembangunan.

(c). Pengawasan yudisial

Pengawasan yudikatif juga di beri hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Penggunaan hak yudisial ini adalah apabila terdapat perselisihan dalam penerapan perundang-undangan oleh badan pemerintah atau kalau ada gugatan masyarakat atau lembaga pemerintah terhadap jalannya perubahan yang di anggap tidak benar. Dalam kasus ini badan yudikatif dapat menginterpretasikan suatu perundang-undangan. Pengawasan yudisial ini berlaku di negara-negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan antara badan legislatif, badan eksekutif dan badan yudikatif seperti di Amerika Serikat.

c. Pengawasan oleh Masyarakat

Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan yang di lakukan oleh suatu negara adalah untuk masyarakat, artinya masyarakatlah yang akan menikmati hasil pembangunan, masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan kalau sesuai dengan selera dan kepentingan umum masyarakat tersebut. Adakalanya masyarakat menyadari apa yang di butuhkan dan kadangkala masyarakat tidak menyadari apa yang di butuhnya dalam pembangunan sehingga tidak muncul suara-suara masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahlah yang harus bertanggung jawab dalam merumuskan kedepan apa yang di butuhkan masyarakat dan pembangunan. Kalau sudah di bangun pemerintah barulah masyarakat merasakan manfaatnya.

Bagi masyarakat yang sudah maju pikirannya mereka akan selalu merasa dan menyadari apa yang mereka butuhkan. Di samping itu dapat menilai apakah

pembangunan yang di lakukan cocok dengan kebutuhan yang dirasakan ataupun tidak, kalau tidak maka akan cepat timbul reaksi. Reaksi tersebut dapat di salurkan melalui badan-badan pemerintah maupun melalui pendapat umum yaitu di surat kabar.

2.1.2. Pembangunan Pemukiman

Pemukiman menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pemukiman mempunyai lingkup tertentu sebagai kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi Pemukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 1 angka (3) UUPP).

Pemukiman merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia yang mempunyai peran strategis dalam pembentukan dan kepribadian bangsa serta dilihat sebagai proses bermukimnya manusia dalam menciptakan suatu ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menanamkan jati dirinya sebagai manusia berbudaya.

Ada beberapa unsur pokok yang terkait erat dengan Pemukiman, antara lain adalah:

1. Adanya tempat hunian yang bersifat perlindungan dan sosialisasi manusia sebagai individu dalam lingkungan terkecil.
2. Tempat hunian yang berfungsi lebih luas yang memperlihatkan adanya kaitan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya.
3. Adanya jaringan pelayanan yang memungkinkan manusia sebagai individu atau masyarakat menjalankan kehidupan dan penghidupannya.
4. Adanya unsur pembatasan yang terkait dengan tingkah laku manusia sebagai individu dan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan penghidupannya.

Keempat unsur pokok diatas menunjukkan Pemukiman dalam menciptakan ruang dan kehidupan senantiasa memerlukan keseimbangan keserasian dan sinergi antar fungsi sebagai unsur sumber daya lainnya. Pemukiman merupakan sub sistem dari suatu sistem ruang yang lebih luas serta terjalannya keserasian diantaranya baik dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendaliannya.

Pembangunan Pemukiman mulai saat ini dan masa yang akan datang sudah saatnya berpegang pada kaidah-kaidah keseimbangan lingkungan. Pemukiman dibangun dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dan dilakukan dengan rasa optimis, sebab saat ini mulai tumbuh kesadaran akan keseimbangan lingkungan, kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta, serta pelibatan ilmuwan dan profesional dalam perencanaan pembangunan Pemukiman.

Cara-cara berpikir yang kreatif, inovatif, sarat dengan gagasan baru dalam mewujudkan pembangunan Pemukiman berkelanjutan, perlu memperhatikan

berbagai aspek, misalnya menyangkut tata ruang, transportasi dan infrastruktur, lapangan pekerjaan, kesenjangan, ketidak-adilan dan kecemburuan (sosial, budaya, ekonomi), kecenderungan-kecenderungan tindakan yang dapat merusak sistem daya dukung lingkungan dan komunitas warganya.

Upaya mewujudkan Pemukiman berkelanjutan, perlu memperhatikan segala aspek yang timbul secara holistik, menyeluruh dan terpadu, tidak dengan pemecahan masalah yang terkotak-kotak.

Untuk mempertahankan lingkungan hidup global dan meningkatkan kualitas Pemukiman, perlu pola berkelanjutan dalam produksi, konsumsi, transportasi, dan pembangunan Pemukiman, pencegahan polusi, tanggap terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan perlindungan terhadap kesempatan-kesempatan generasi yang akan datang. Sehingga perlu melakukan tindakan-tindakan yang konsisten dengan pendekatan prinsip pencegahan, pelestarian fungsi lingkungan, terutama terhadap ketentuan keamanan kuantitas air bersih dan manajemen limbah yang efektif.

Pemukiman yang layak bagi semua orang, tidak ada diskriminasi dalam hal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, suku, atau status lainnya, kesempatan mendapatkan rumah, sarana dan prasarana, pelayanan, kesehatan, berkaitan dengan makanan dan air, pendidikan, dan area terbuka.

Perencanaan pembangunan Pemukiman hendaknya memasukkan unsur kemampuan keuangan dan desain bagi calon penghuni, ketentuan yang harus ditaati, pembangunan dan manajemen Pemukiman yang baik, serta masyarakat ikut berperan serta dalam penyediaan fasilitas seperti menyesuaikan,

mengintegrasikan semua kondisi, penyatuan, pemeliharaan, peningkatan, perlindungan yang terkait dengan Pemukiman maupun akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana, serta penghidupan berkelanjutan.

Kesehatan dan kualitas hidup manusia merupakan sentral dari mengembangkan pembangunan Pemukiman berkelanjutan. Dengan demikian, Pemukiman berkelanjutan tergantung dari interaksi kebijakan-kebijakan pembangunan dan tindakan nyata untuk akses penyediaan kebutuhan makanan dan gizi, air bersih, sanitasi, dan sarana umum untuk pelayanan perawatan kesehatan.

Pemerintah perlu untuk merespon kebijakan yang efektif dalam perencanaan maupun melaksanakan pembangunan Pemukiman dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, mengurangi pemanfaatan lahan hijau untuk Pemukiman serta jalur transportasi.

Memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka makna pembangunan dalam pembangunan Pemukiman dapat didefinisikan secara umum sebagai tindakan mendirikan bangunan, teknologi, penambahan atau operasi lain di dalam atau dibawah tanah, atau membuat perubahan bahan material yang digunakan untuk bangunan atau lahan.

Namun demikian, dalam pembangunan Pemukiman perlu juga diperhatikan dan disadari pentingnya *"a sense of place"* atau ruang rasa dalam sekitar rumah dan lingkungannya. Rumah yang mengakar merupakan penghubung antara masa lampau dan masa kini dan masa depan, antara alam dan lingkungan binaan, antara satu generasi dengan generasi berikutnya.

Terciptanya cita rumah dan lingkungan yang khas, diserahkan saja kepada penghuninya sendiri. Rumah dan lingkungan tidak dilihat sebagai produk akhir harga mati, melainkan sebagai suatu proses terus menerus. Bahkan lebih jauh lagi, bisa sebagai instrumen dan motor pembangunan (Budiharjo, 1998 : 17).

Oleh karena itu, lingkungan Pemukiman yang beragam hanya dikenali dari nomornya, mengingkari tuntutan manusiawi terhadap perlunya rasa ruang. Pengenalan terhadap suatu tempat hanya mungkin bila dilihat dari:

1. Atribut fisik dari bangunan dan lingkungannya (warna, bentuk, ukuran, tekstur)
2. Aktivitas dan perilaku manusianya.
3. Konsepsi dan penyanderaan terhadap tata ruang lingkungan tersebut.

Disamping itu juga, pengembangan usaha dalam sektor Pemukiman pada dasarnya harus mengikuti:

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman.
2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Badan Kebijakan Pengendalian
3. Pembangunan Pemukiman Nasional (BKP4N) No.217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pemukiman (KSNPP).

2.2. Definisi Konsep

2.2.1. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

2.2.2. Pembangunan Pemukiman

Pembangunan Pemukiman adalah pembangunan lingkungan yang terdiri dari kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang meliputi tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

2.3. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bersifat dinamis, artinya definisi yang telah terkonsep dalam landasan teoritis ini sewaktu-waktu bisa saja berubah dan berkembang relevan dengan kondisi lapangan yang bersifat empiris. Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka teori yang menjadi referensi teoritis dalam penelitian ini, maka indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tunggal (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Pemukiman) yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (Handoko, 1994: 373-374) :

1. Akurat,

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Objektif dan menyeluruh

Informasi harus bersifat objektif dan mudah dipahami.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan berakibat fatal.

5. Realistik dan ekonomis

Pengawasan yang dilakukan harus relevan dengan fakta yang ada, serta berprinsip ekonomis sehingga dapat tercapai efisiensi.

6. Realistik secara operasional

Sistem pengawasan harus sesuai atau harmonis dengan kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Hal ini dibutuhkan karena setiap tahun dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang membutuhkannya.

8. Fleksibel

Untuk memberikan tanggungan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungannya.

9. Berfungsi sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10. Diterima para anggota organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengesahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggungjawab, dan prestasi.

11. Kualitas hasil pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan keberlangsungan ekosistem yang ada, baik lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kemudian pengawasan yang dilakukan juga bertujuan untuk menjaga agar proyek pembangunan relevan dengan tujuan dan sasaran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, studi ini memusatkan perhatian pada masalah/fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, yang bersifat aktual, yang kemudian digambarkan realita tentang masalah yang diamati dengan interpretasi rasional yang jelas dan kuat.

3.2 Lokasi & Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2009.

3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002 : 57). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang berjumlah 42 orang dan masyarakat Kota Pekanbaru.

Sedangkan Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Sugiyono mengatakan

bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2002 : 57).

Dalam melakukan teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode *non probability sampling* dimana dalam teknik ini jumlah atau ukuran sampel disesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian. Spesifikasi metode *non probability sampling* yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2002 : 96).

Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah:

1. Kepala dan Pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sebanyak 26 orang.
2. Masyarakat Kota Pekanbaru sebanyak 20 orang.

Sedangkan *key informan* yang akan diwawancarai oleh peneliti, yang merupakan bagian dari sampel penelitian ini dan diharapkan mampu untuk memberikan informasi yang valid adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru
2. Kepala Sub-Dinas Pengawasan, Dinas Tata ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru
3. Masyarakat sebanyak 4 orang yang tersebar dikawasan permukiman Kota Pekanbaru, yang peneliti tentukan berdasarkan pertimbangan peneliti yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan demikian, jumlah sampel secara keseluruhannya adalah 46 orang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam pembangunan permukiman. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari informan terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden berupa angket, yaitu mengumpulkan data dengan membuat beberapa pertanyaan tertulis serta alternatif jawabannya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, yaitu responden hanya memberikan jawaban berdasarkan dari opsi-opsi yang ada dalam angket (jawaban telah ditentukan oleh peneliti).
- c. Observasi, yaitu suatu cara yang digunakan dengan pengamatan serta pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, secara langsung ditujukan pada responden untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dilembaga pemerintah, organisasi, atau lembaga lainnya. Adapun data sekunder yang diambil guna mendukung penelitian ini antara lain:

- a. Tinjauan kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan membaca buku-buku ilmiah tentang masalah yang sedang diteliti.
- b. Studi dokumentasi yaitu dengan menelaah catatan tertulis, arsip yang menyangkut masalah yang diteliti yang ada pada instansi terkait.
- c. Data-data yang diperoleh dari kantor Dinas Tata ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yaitu data/dokumen tentang pengawasan dalam pembangunan permukiman (relevan dengan masalah yang diteliti).

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini dengan metode deskriptif yaitu proses analisa secara sistematika faktual dan akurat dalam pengambilan suatu kesimpulan, dengan cara membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori dan memahaminya dengan menguraikan, dimana sebelumnya data dikumpulkan, ditabulasi dan di persentasekan serta dianalisis relevan dengan tujuan penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kantor Dinas Tata Ruang Dan Bangunan

Terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang dulunya bernama Dinas Tata Kota Pekanbaru merupakan salah satu faktor dari perkembangan zaman yang semakin maju dan meningkat. Dinas Tata Ruang Dan Bangunan merupakan salah satu pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 (SK Nomor 434/0111/1991) tanggal 31 Agustus 1991 dan terdapat lembaran Undang-Undang Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 14 Desember 1991 Nomor 6 tahun 1991 seri Dinas Tata Ruang Dan Bangunan sebagai realisasi PERDA Nomor 11 tahun 1989 Tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, maka dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat II Riau Nomor : Kpts.727/xi/1992 tanggal 14 November 1992 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Tata Kota dan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Riau Nomor : 8803/xII/1992 tanggal 24 November 1992 ditetapkan Pengangkatan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi dilingkungan Dinas Tata Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, serta berdasarkan SK Nomor : SK.821.3/KP/93/13 tanggal 5 Maret 1993 diangkat pula Urusan dan Kepala Sub Seksi serta Pegawai Biasa/Staf Pembantu.

4.2. Visi dan Misi Kantor Dinas Tata Ruang Dan Bangunan

4.2.1. Visi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan.

Visi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan adalah *"Terwujudnya Kota Pekanbaru yang Tertib Tata Ruang dan Bangunan Serta Bercirikan Budaya Melayu Melalui Pelayanan yang Prima"*

4.2.2. Misi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan.

Berdasarkan visi tersebut diatas, maka selanjutnya Dinas Tata Ruang Dan Bangunan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Membentuk Kota Pekanbaru yang tertib tata ruang, tertib tata bangunan indah dan nyaman.
- b. Menciptakan Kawasan-kawasan dengan ciri tradisional melayu yang dapat dijadikan pusat orientasi kota.
- c. Mewujudkan pelayanan yang prima sehingga meningkatkan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Pekanbaru.

4.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan.

Dinas Tata Ruang Dan Bangunan tugas-tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga dibidang tata ruang dan bangunan kota.
- b. Melaksanakan pembentukan bidang tata ruang dan bangunan kota yang diserahkan oleh kepala daerah.

Tugas-tugas pokok Dinas Tata Ruang Dan Bangunan secara terperinci sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengelola dan menyampaikan data yang berkenaan dengan tata kota.
- b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian perlengkapan dan keuangan.
- c. Membuat perencanaan kerja dibidangnya dan secara teknis melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tata Ruang Dan Bangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana tata ruang kota (RUTRK) serta kegiatan yang menjurus dan berhubungan dengan hal tersebut diatas.
- b. Melakukan kegiatan pengukuran dan pengawasan dalam rangka menyusun perencanaan kota yang terperinci dalam bentuk *blend*.
- c. Menyiapkan rencana peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan penelitian, memberikan petunjuk dan mengarahkan teknik terhadap usaha-usaha pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan dan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 Dinas Tata Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.

- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi
- d. Pembinaan dan pelaporan
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas

4.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

Sesuai dengan Perda Nomor 11 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Perda Nomor 7 tahun 2001, kemudian diperbaharui lagi sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2008, struktur organisasi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan dalam melaksanakan fungsinya langsung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta dibantu oleh beberapa bagian, sekretariat sub-sub dinas dan bidang-bidang dinas.

Demii kelancaran proses pelaksanaan tugas yang ada, kepala dinas dibantu oleh sekretariat sub-sub dinas dan bidang-bidang dinas uraian tugas tersebut antara lain:

4.4.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah sebagai pemimpin Dinas Tata Ruang dan Bangunan, membantu Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang tugasnya dan tugas pembuatan yang diberikan oleh pemerintah, serta pemimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

4.4.2. Sekretariat

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan menyusun program dinas.

4.4.3. Bidang Data dan Informasi

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan survey dan pemetaan, penelitian pengembangan tata ruang, dokumentasi dan penyebaran informasi, pengolahan serta di lingkungan dinas.

4.4.4. Bidang Tata Ruang

Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan penyusunan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4.4.5. Bidang Bangunan

Tugas pokok Sub-dinas ini adalah mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan penelitian administrasi, penelitian teknis dan penetapan perizinan..

4.4.6. Bidang Pengawasan Bangunan

Tugas pokok bidang pengawasan bangunan adalah mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan dibidang penertiban bangunan, pengawasan operasional perizinan dan pengawasan seksi pengaduan dan pelaporan.

4.4.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas lainnya.

4.4.8. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidang keahlian.

4.5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Tata Ruang Dan Bangunan

Jumlah pegawai Dinas Tata Ruang Dan Bangunan berjumlah 48 orang termasuk kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan. Sedangkan status seluruh pegawai Dinas Tata Ruang Dan Bangunan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan demikian dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Usia

No	Jenis Kelamin	Usia	Jumlah
1	Laki-laki	21 - 27	2
2	Perempuan		3
3	Laki-laki	28 - 34	5
4	Perempuan		7
5	Laki-laki	35 - 41	6
6	Perempuan		3
7	Laki-laki	42 - 48	5
8	Perempuan		4
9	Laki-laki	49 - 55	5
10	Perempuan		2
Jumlah			42

Sumber Data : Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

BAB V

ANALISA DATA

5.1. Identitas Informan

Dalam penelitian ini, informan dibagi kedalam dua bagian, yaitu informan pemerintah dan informan masyarakat.

5.1.1. Informan Pemerintah

Berdasarkan data yang terhimpun, maka dapat diketahui identitas informan pada kantor Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru yaitu lebih didominasi oleh pegawai laki-laki, sedangkan ditinjau dari usia, pegawai lebih dominan berusia 21-30 tahun, dari segi pengalaman atau lamanya pegawai bertugas pada Kantor Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru yaitu yang lebih dominan yang memiliki pengalaman kerja selama 6-10 tahun, terakhir ditinjau dari golongan pegawai, dapat kita ketahui bahwasanya pegawai yang lebih mendominasi yaitu yang memiliki golongan I/A-I/E. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel yang disajikan dibawah ini:

Tabel 2 : Distribusi Informan Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	21-30 tahun	13	50
2	31-40 tahun	7	26,92
3	41-50 tahun	4	15,38
4	51-60	2	7,70
5	60 ke atas	-	-
Jumlah		26	100%

Kuesioner : Penelitian tahun 2009

Berdasarkan tabulasi diatas maka dapat kita ketahui bahwasanya informan di Kantor Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang memiliki usia 21-30 yaitu berjumlah 13 orang (50%) sedangkan yang berusia 31-40 yaitu berjumlah 7 orang (26,92%). Adapun yang berusia 41-50 berjumlah 4 orang (15,38%) dan terakhir pegawai berusia 51-60 yaitu hanya berjumlah 2 orang (7,70%).

Tabel 3: Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	15 Orang	57,69
2	Perempuan	11 Orang	42,31
Jumlah		26	100%

Kuesioner : Penelitian tahun 2009

Dari tabel tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang (57,69 %), dan perempuan berjumlah 11 orang (42,31 %).

Tabel 4 : Distribusi Informan Berdasarkan pengalaman Kerja

No	Lama Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1	1-5 tahun	11	42,30
2	6-10 tahun	7	26,93
3	11-15 tahun	6	23,07
4	16-20 tahun	2	7,70
5	15 tahun ke atas	-	-
Jumlah		26	100%

Kuesioner : Penelitian tahun 2009

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pengalaman kerja informan pada kantor Dinas Tata Kota - Kota Pekanbaru yang sangat mendominasi adalah pegawai yang bekerja berkisar 1-5 tahun yaitu berjumlah 11 orang (42,30%) kemudian disusul oleh pegawai yang memiliki pengalaman kerja berkisar antara 6-10 tahun yaitu berjumlah 7 orang (26,93%) sedangkan pegawai yang memiliki

pengalaman kerja 11-15 berjumlah 6 orang (23,07%) dan yang memiliki pengalaman kerja 16-20 tahun yaitu berjumlah 2 orang (7,70%).

Tabel 5 : Distribusi Informan Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	I/A-I/E	10	38,46
2	II/A-II/E	8	30,77
3	III/A-III/E	6	23,07
4	IV/A-IV/E	2	7,70
Jumlah		26	100%

Kuesioner : Penelitian tahun 2009

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa informan pegawai yang mendominasi adalah pegawai yang memiliki pangkat I/A-I/E adalah sebanyak 10 orang (38,46%), dan berikutnya pegawai yang memiliki II/A-II/E yaitu sebanyak 8 orang (30,77%) dan berikutnya adalah pegawai yang memiliki pangkat III/A-III/E adalah sebanyak 6 orang (23,07%) dan yang memiliki pangkat IV/A-IVE adalah sebanyak 2 orang (7,70%).

5.1.2. Informan Masyarakat

Tabel 6 : Distribusi Informan Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	21-30 tahun	6	30,00
2	31-40 tahun	11	55,00
3	41-50 tahun	3	15,00
Jumlah		20	100%

Kuesioner : Penelitian tahun 2009

Dari tabel dapat dilihat, informan masyarakat dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya berjumlah 20 orang, dengan klasifikasi umur seperti terdapat pada tabel diatas; 11 orang informan (55%) berumur 31-40 tahun, 6 orang informan (30%) berumur 21-30 tahun, dan 3 orang informan (15%) berumur 41-50 tahun.

Tabel 7 : Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	14 Orang	70,00
2	Perempuan	6 Orang	30,00
Jumlah		20	100%

Kuesioner : Penelitian tahun 2009

Dari tabel tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang (70%), dan perempuan berjumlah 6 orang (30%).

Tabel 8 : Distribusi Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mahasiswa	2	10,00
2	Wiraswasta	4	20,00
3	Pegawai Negeri Sipil/Honorir	5	25,00
4	Pedagang	6	30,00
5	Pengangguran	3	15,00
Jumlah		20	100%

Kuesioner : Penelitian tahun 2009

Dari tabel dapat kita ketahui bahwa 6 orang informan (30%) bekerja sebagai Pedagang, 5 orang informan (25%) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/Honorir, 4 orang informan (20%) bekerja sebagai wiraswasta, 3 orang informan (15%) pengangguran, dan 2 orang informan (10%) bekerja sebagai Mahasiswa.

Tabel 9 : Distribusi Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar	2	10,00
2	SLTP/Sederajat	4	20,00
3	SLTA/Sederajat	8	40,00
4	Perguruan Tinggi	6	30,00
Jumlah		20	100%

Kuesioner : Penelitian tahun 2009

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa 8 orang informan (40%) berlatar belakang pendidikan SLTA/Sederajat, 6 orang informan (30%) dengan latar belakang pendidikan Perguruan Tinggi, 4 orang informan (20%) dengan latar belakang pendidikan SLTP/ sederajat, dan 2 orang informan (10%) dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar.

5.2. Distribusi dan Analisa Jawaban Informan

Berdasarkan data yang diperoleh, maka diperoleh klasifikasi jawaban informan secara keseluruhan sebagaimana tergambar dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 10: Klasifikasi Jawaban Informan Terhadap Pertanyaan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Permukiman.

No	Alternatif Jawaban Informan	Informan				Jumlah	
		Aparat		Masyarakat			
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	14	53,85	7	35	21	45,65
2.	Ragu-ragu	4	15,38	4	20	8	17,40
3.	Tidak	8	30,77	9	45	17	36,95
Jumlah		26	100	20	100	46	100

Kuesioner : Penelitian tahun 2009

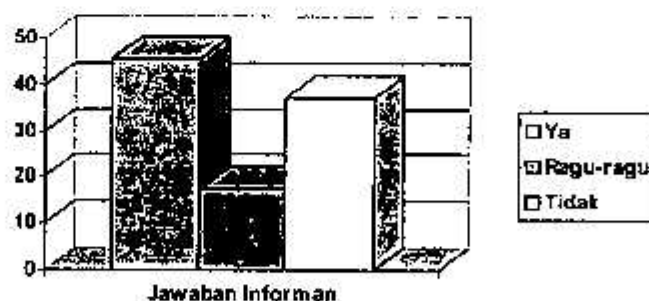


Diagram: Klasifikasi Jawaban Informan Terhadap Pertanyaan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru Dalam Pembangunan Permukiman.

Berdasarkan pada tabel dan diagram diatas, dapat diketahui sebanyak 21 orang (45,65%) informan menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dalam pembangunan permukiman sudah berjalan dengan baik, 17 orang (36,95%) informan menyatakan bahwa fungsi pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dalam pembangunan permukiman tidak berjalan dengan baik, dan 8 orang (17,40%) informan menyatakan ragu-ragu terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dalam pembangunan permukiman jika dinilai sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya penulis akan menginterpretasikan variabel penelitian melalui indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil data yang diperoleh dilapangan, baik melalui wawancara, kuesioner, maupun observasi. Hal ini dilakukan untuk melihat relevansi hasil klasifikasi jawaban informan yang ditabulasikan dengan pendekatan kuesioner seperti yang terdapat pada tabel dan diagram diatas.

5.2.1. Akurat.

Pembangunan Kota Pekanbaru yang multisektoral mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Pelaksanaan pembangunan dimaksud untuk mencapai kemajuan Kota Pekanbaru. Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru secara fungsional berperan sebagai salah satu elemen vital dalam pembangunan Kota Pekanbaru, dimana secara substantif tidak terlepas dari fungsi manajemen yang ada. Dimulai dari merencanakan, mengorganisir, mengimplementasikan, hingga mengawasi dan mengevaluasi proses pembangunan yang ada. Terkait dengan

penelitian ini, maka fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Tata Kota.

Untuk memperoleh data yang valid mengenai hasil pelaksanaan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru, maka perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah, agar validitas informasi dapat diuji dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru mendapat pengawasan dari Dinas Tata Kota. Pengawasan yang telah dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi suatu kegiatan. Pengawasan juga dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu program, sejauhmana program tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Pengawasan tersebut diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui.

Pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru selama ini mendapatkan pengawasan dari Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru. Dimulai dari pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), hingga pelaksanaan suatu proyek pembangunan yang telah mendapatkan izin.

Keinudian, pengawasan yang dilakukan pemerintah tidaklah cukup untuk mencapai tujuan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Melainkan juga diperlukan kerjasama dari masyarakat untuk bersama-sama merealisasikan tujuan dari pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Mengingat tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah memberikan pemahaman yang sama sehingga pembangunan permukiman yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan satu persepsi. Dalam hal ini Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru telah

bersama-sama melakukan pengendalian dalam proses pembangunan permukiman yang ada. Meskipun sampai saat ini masih dinilai belum optimal. Kendatipun demikian, telah ada upaya sadar dan kolektif dari berbagai pihak dalam membangun dan menata pembangunan permukiman yang lebih baik.

Proses pembangunan permukiman yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari pengawasan efektif yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru, guna implementasi pembangunan yang ada berjalan relevan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan pengakuan Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik, demi terwujudnya struktur Kota Pekanbaru yang terpola, dan sistematis.

Berdasarkan data yang terhimpun, dapat disimpulkan bahwa akurasi dalam penyediaan informasi yang akurat, terkait pembangunan permukiman guna melakukan usaha-usaha preventif dinilai baik, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru yang dijalankan oleh Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru.

5.2.2. Tepat Waktu

Tepat waktu dimaksudkan sebagai informasi yang harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, apabila terjadi penyimpangan maka diperlukan usaha perbaikan. Untuk hal ini, diperlukan informasi yang merupakan hasil dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan guna keperluan evaluasi dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Oleh karena itu, penyediaan informasi pengawasan tersebut harus tepat waktu agar kesalahan yang ada dapat diperbaiki secepat mungkin sehingga kegiatan pembangunan dapat dilanjutkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru, penyediaan informasi-informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu. Sub Dinas Pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru telah menghimpun dan menyediakan data maupun informasi terkait pembangunan permukiman dengan baik.

Hal ini relevan dengan penuturan Kepala Sub-Dinas Pengawasan, bahwa informasi-informasi yang dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya dan dilaksanakan tepat waktu apabila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

5.2.3. Objektif dan menyeluruh

Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan permukiman tidak hanya dijalankan secara rutin, tetapi juga pada dasarnya harus dilakukan secara langsung. Dalam pelaksanaan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru, Dinas Tata Kota mengamati dan mengawasi langsung secara berkala. Hal ini diperlukan agar aplikasi dari perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan izin dan rekomendasi pembangunan suatu proyek dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, ketimpangan-ketimpangan

apapun dapat segera diatasi dan dihindari, serta informasi yang diperoleh lebih objektif dan menyeluruh.

Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa setelah Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru mengeluarkan izin atas pendirian suatu bangunan selanjutnya akan dilakukan pengawasan langsung di lokasi pembangunan. Begitu pula halnya dengan pembangunan permukiman yang selama ini dilaksanakan. Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru telah mengawasi kawasan permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru, dengan memaksimalkan kinerja bawahannya yang bertugas sebagai pengawas di masing-masing kecamatan sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian hasil dari pengawasan tersebut di sampaikan dalam bentuk laporan yang disusun secara rutin 3 bulan sekali.

5.2.4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan berakibat fatal.

Pengawasan terhadap pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru telah dijalankan dengan ketat. Mengingat penyimpangan kerap kali terjadi, terlebih bagi daerah-daerah yang tercatat padat penduduk. Sehingga terkadang masyarakat tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Tata Kota selaku pihak yang menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan permukiman tersebut.

Sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa pelaksanaan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota sudah dinilai baik. Dimana pegawai yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terbagi secara proporsional untuk setiap kecamatan di Kota Pekanbaru. Setiap kecamatan berada dibawah pengawasan masing-masing koordinator yang telah ditentukan oleh Kepala Sub-Dinas Pengawasan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru. Pengawasan dilakukan secara rutin dalam setiap bulannya. Kemudian hasil dari pengawasan yang telah dilakukan selanjutnya disusun dalam bentuk laporan yang diberikan kepada atasan dalam jangka waktu triwulan. Hal ini dimaksudkan agar setiap ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan permukiman dapat diminimalisir, dan dapat ditindak dengan cepat.

5.2.5. Realistik dan ekonomis

Pengawasan yang dilakukan harus relevan dengan fakta yang ada, serta berprinsip ekonomis sehingga dapat tercapai efisiensi. Salah satu tujuan dilakukannya pengawasan yaitu melakukan tindakan korektif sekaligus menindak lanjuti tiap perubahan yang ada. Apabila pelaksanaan suatu program pembangunan permukiman tersebut irelevan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka diharapkan dapat tindakan perbaikan dapat dilakukan secepat mungkin, dengan mengindahkan prinsip ekonomis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub-Dinas Pengawasan, Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru kerap kali menindak tiap penyelewengan yang terjadi, serta melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan harapan agar

pembangunan permukiman sebagaimana yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. Seperti pembangunan suatu gedung yang dalam perizinan difungsikan sebagai rumah, namun pada saat pembangunannya berubah menjadi bangunan toko. Untuk persoalan seperti ini perlu diperbaiki dan diluruskan kembali, agar tidak terjadi ketimpangan yang menyalahi aturan dan perizinan yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru bersifat ekonomis, dengan tidak banyak menghabiskan anggaran untuk implementasi tugas yang telah ditentukan.

5.2.6. Realistik secara operasional

Pembangunan daerah Kota Pekanbaru yang multisektoral digariskan didalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru. Baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, maupun dalam sektor pembangunan fisik, infrastruktur, perumahan dan permukiman, dan lain-lain. *Master Plan* yang dirancang oleh pemerintah daerah menjadi acuan yang memuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan suatu program pembangunan/kebijakan, dan diterjemahkan didalam bentuk peraturan daerah.

Begitu pula halnya dengan pembangunan permukiman, Pemerintah Kota Pekanbaru merancang pembangunan permukiman kota dengan memperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalisasian tata ruang yang ada.

Jalanaya pembangunan khususnya di sektor permukiman Kota Pekanbaru, relevan dengan perencanaan kota yang telah disusun dan ditetapkan oleh

pemerintah Kota Pekanbaru, Dimana seluruh permukiman terkoordinasi dan *termanage* dengan baik. Baik oleh pihak pemerintah, maupun pihak masyarakat yang terjalin melalui proses kerjasama yang baik.

Pembangunan permukiman yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru relevan dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Pekanbaru menjadi landasan dalam implementasi pembangunan multisektoral, khususnya pembangunan permukiman yang ada.

Perencanaan dan pelaksanaan merupakan suatu proses yang integral dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dimana perencanaan merupakan langkah awal dalam menuju proses pelaksanaan. Suatu proses implementasi program/kegiatan harus mempertimbangkan perencanaan yang ada. Perencanaan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu kegiatan harus sesuai dengan perencanaan awal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kecamatan Sukajadi (wawancara pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2009), pelaksanaan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rencana pembangunan kawasan permukiman dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru berjalan realistis secara operasional. Hal ini terlihat dimana pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru memenuhi kriteria prosedur

dan peraturan yang berlaku, disamping itu juga pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan main yang jelas serta hasilnya pun realistis.

5.2.7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Hal ini dibutuhkan karena setiap tahun dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang membutuhkannya.

Selain pengawasan eksternal, seperti pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi diluar Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru, maka telah dilaksanakan juga pengawasan internal yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Kota dalam mengawasi kinerja bawahannya. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Kota tersebut merupakan pengawasan langsung kepada bawahan sebagai pengawasan *intern*.

Menurut Kepala Sub-Dinas Pengawasan Tata Kota Pekanbaru, pengawasan internal yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru terhadap kinerja bawahannya yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan pembangunan permukiman belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini diakui sebagai suatu keterbatasan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dalam mengkoordinir aktivitas bawahan secara efektif. Untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan, merupakan hal yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh atasannya, dikarenakan kesibukan kerja yang setiap hari dilatujnya.

Kemudian, dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya suatu pembangunan, terkadang diperlukan kerjasama melalui jalur kemitraan dengan

pihak lain. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antar satu instansi/pihak dengan instansi/pihak lain yang berkepentingan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh pihaknya (Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru) tidak melibatkan pihak ketiga. Artinya, pengawasan yang dilakukan merupakan kinerja dari Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru sendiri. Walaupun ada keterlibatan pihak ketiga, namun bukan sebagai mitra kerja Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan permukiman, melainkan hanya sebagai unsur pembantuan yang membantu menghimpun data untuk kepentingan mereka.

Selanjutnya, hasil dari pengawasan pembangunan permukiman disusun secara sistematis dan kemudian disampaikan dalam bentuk laporan kepada pejabat yang berwenang. Laporan ini menunjukkan kondisi riil pembangunan permukiman yang dilaksanakan. Tentu saja laporan ini dibuat dan dipertanggungjawabkan secara periodik, sebagai aplikasi dari pelaksanaan pengawasan yang baik. Demikian juga halnya frekuensi laporan dalam 1 tahun. Diharapkan laporan tersebut dapat dibuat secara rutin dan berkesinambungan.

Berdasarkan penuturan Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru, laporan hasil pengawasan disampaikan secara rutin. Dimana masing-masing koordinator pengawasan untuk masing-masing kecamatan memberikan laporan berdasarkan pada kondisi riil lokasi kerjanya masing-masing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru selama ini belum terkoordinasi dengan aliran kerja yang ada.

5.2.8. Fleksibel

Salah satu tujuan dilakukannya pengawasan yaitu melakukan tindakan korektif sekaligus menindak lanjuti tiap perubahan yang ada. Apabila pelaksanaan suatu program pembangunan permukiman tersebut irelevan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka diharapkan dapat tindakan perbaikan dapat dilakukan secepat mungkin.

Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan, apabila terjadi penyimpangan maka diperlukan usaha perbaikan. Untuk hal ini, diperlukan informasi yang merupakan hasil dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan guna keperluan evaluasi dalam memperbaiki kesalahan yang ada. Oleh karena itu, penyediaan informasi pengawasan tersebut harus tepat waktu agar kesalahan yang ada dapat diperbaiki secepat mungkin sehingga kegiatan pembangunan dapat dilanjutkan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan permukiman selama ini bersifat fleksibel. Informasi terkait pembangunan permukiman tersedia kapan saja dibutuhkan, dan tindakan pengawasan dilakukan dengan mempersiapkan tindakan-tindakan perbaikan apabila diperlukan.

5.2.9. Berfungsi sebagai petunjuk dan operasional

Pengawasan pembangunan permukiman yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru telah dijalankan dengan tegas, yaitu dengan mengambil

langkah/tindakan secepat mungkin dalam menghadapi tiap pelanggaran yang ada. Banyak persoalan yang dapat ditimbulkan dari pembangunan permukiman apabila tidak memenuhi prosedur dan peraturan yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi masyarakat yang akan mendirikan suatu bangunan. Oleh karena itu, pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasannya harus tegas dalam menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut.

Tidak adanya pengawasan ketat dari Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru terhadap bawahannya yang menjalankan fungsi pengawasan pembangunan permukiman, tentu saja akan berdampak pada kesinambungan dan kualitas kinerja bawahan. Salah satunya adalah terkait persoalan kedisiplinan dan akurasi output dari kinerja mereka pada perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan berakibat fatal bagi pelaksanaan pembangunan permukiman, maka diperlukan adanya suatu pedoman yang dijadikan sebagai landasan berpijak dari berlangsungnya proses pembangunan yang dimaksud. Hal ini diperlukan agar terdapat keserasian antara pembangunan yang dilaksanakan dengan perencanaan dan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil angket yang dihimpun dari informan diatas, diketahui bahwa pedoman pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru tidak ada. Hal ini bertentangan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru yang menyebutkan bahwa pedoman yang dimaksud, baik berupa juklak (petunjuk pelaksanaan) maupun juknis (petunjuk

teknis) dari pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan permukiman sebenarnya sudah ada. Namun, kendalanya adalah masih ada pegawai/pejabat yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan dalam pembangunan permukiman tidak mengetahui pedoman tersebut. Ini merupakan kelemahan yang dimiliki oleh pihak Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan bahkan mengembangkan pemahaman akan tugas yang mereka jalankan. Ironisnya, mereka bekerja tanpa arah yang jelas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dapat disimpulkan bahwa, fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan oleh Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru belum memiliki petunjuk teknis dan operasional. Oleh karena itu, pengawasan yang seharusnya dapat berfungsi sebagai petunjuk dan operasional, tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

5.2.10. Diterima para anggota organisasi

Pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak terdapat persoalan yang perlu ditangani, seperti persoalan pengawasan internal kepada pegawai yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Kondisi yang seperti ini bisa saja berimplikasi pada lemahnya kontrol kepada bawahan yang menjalankan fungsi pengawasan pembangunan permukiman. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pembangunan permukiman sebagai akibat dari kelalaian pegawai yang berwenang, maka tindakan korektif serta usaha perbaikan sulit untuk dilakukan sedini mungkin.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru, dimana kontrol dari atasan kepada bawahan khususnya kepada pegawai yang bertugas melaksanakan pengawasan pembangunan permukiman dinilai kurang. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki atasan (yang dalam hal ini Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dan Kepala Sub-Dinas yang ada). Sehingga tidak ada bawahan yang mendapatkan teguran atau sanksi apabila melakukan kesalahan dan lalai dalam menjalankan tugas. Kondisi yang seperti ini bisa saja berimplikasi pada lemahnya kontrol kepada bawahan yang menjalankan fungsi pengawasan pembangunan permukiman. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pembangunan permukiman sebagai akibat dari kelalaian pegawai yang berwenang, maka tindakan korektif serta usaha perbaikan sulit untuk dilakukan sedini mungkin.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru, dimana kontrol dari atasan kepada bawahan khususnya kepada pegawai yang bertugas melaksanakan pengawasan pembangunan permukiman dinilai kurang. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki atasan (yang dalam hal ini Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dan Kepala Sub-Dinas yang ada). Sehingga tidak ada bawahan yang mendapatkan teguran atau sanksi apabila melakukan kesalahan dan lalai dalam menjalankan tugas. Kondisi yang seperti ini bisa saja berimplikasi pada lemahnya kontrol kepada bawahan yang menjalankan fungsi pengawasan pembangunan permukiman. Sehingga apabila terjadi kesalahan dalam pembangunan

permukiman sebagai akibat dari kelalaian pegawai yang berwenang, maka tindakan korektif serta usaha perbaikan sulit untuk dilakukan sedini mungkin.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru, dimana kontrol dari atasan kepada bawahan khususnya kepada pegawai yang bertugas melaksanakan pengawasan pembangunan permukiman dinilai kurang. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki atasan (yang dalam hal ini Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru dan Kepala Sub-Dinas yang ada). Sehingga tidak ada bawahan yang mendapatkan teguran atau sanksi apabila melakukan kesalahan dan lalai dalam menjalankan tugas.

Selanjutnya, dalam suatu organisasi, pembagian tugas sangat urgen, mengingat banyaknya tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh suatu organisasi, dan agar tercapainya efektifitas dan efisiensi organisasi, maka diperlukan adanya pembagian tugas yang proporsional dan profesional. Yang dalam hal ini adalah tugas unit pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru yang begitu kompleks dan luas. Dengan demikian, pembagian tugas merupakan sesuatu yang urgen dan signifikan.

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, pengawasan dijalankan oleh masing-masing koordinator pengawasan yang tersebar di tiap kecamatan Kota Pekanbaru. Masing-masing koordinator merupakan pegawai Sub-Dinas Pengawasan Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru yang ditempatkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan mengingat luasnya daerah Kota Pekanbaru, jadi diperlukan adanya pembagian kerja,

selingga pengawasan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan dengan baik.

5.2.11. Kualitas hasil pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan pembangunan merupakan garis kebijaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dimana kebijakan tersebut tidak akan terlepas dari yang namanya fungsi manajemen. Proses manajemen yang ada memiliki tahapan yang sistematis dan integral antara satu dengan yang lainnya.

Pembangunan permukiman harus memperhatikan keberlangsungan ekosistem yang ada, baik lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kemudian pengawasan yang dilakukan juga bertujuan menjaga agar proyek pembangunan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian yaitu kondisi lingkungan hidup yang harus terjamin keberlangsungannya. Dalam pembangunan permukiman hal ini perlu diperhatikan dengan seksama. Bagaimana supaya pembangunan permukiman dapat menjamin keberlangsungan lingkungan hidup, tentu saja menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat. Jika kita melihat realita yang ada di Kota Pekanbaru, berlangsungnya pembangunan permukiman selama ini dikategorikan belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud.

Pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru kontemporer, belum memperhatikan faktor ekologi yang ada. Sebagai contoh pembangunan permukiman di beberapa daerah seperti di Kecamatan Sail, pembangunan permukiman yang ada menyebabkan banjir, akibat dari lahan permukiman yang

digunakan masyarakat merupakan kawasan pinggiran sungai yang sengaja ditimbun oleh masyarakat untuk keperluan membangun rumah yang berdampak pada kondisi permukiman setempat. Begitu juga di Kecamatan Rumbai, kawasan permukiman penduduk kerap kali mengalami banjir. Hal ini juga disebabkan oleh pembangunan permukiman yang tidak mempertimbangkan faktor ekologi yang ada. Keberlanjutan ekologi tidak akan bisa terjamin apabila hal ini terus berlanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kecamatan Tampan, (tanggal 12 Mei 2009) dapat di informasikan bahwa pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru selama ini banyak yang bermasalah dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan daerah dimana prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi pilar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Yang mana salah satu aspek pembangunan berkelanjutan adalah lingkungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang jangan sampai berdampak pada ketidakmampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Apabila persoalan pembangunan permukiman tidak segera diatasi, maka yang ditakutkan adalah dampak yang harus diterima oleh generasi mendatang.

Hal ini sejalan dengan pengakuan warga Kecamatan Rumbai (13 Mei 2009), yang mana menurutnya lingkungan hidup kerap kali diabaikan dalam pembangunan permukiman. Terkadang dalam pembangunan permukiman, lahan yang dibuka tidak strategis dan bahkan dapat merusak ekologi. Seperti pembangunan permukiman dikawasan pinggiran sungai yang tentu saja berdampak pada keberlangsungan sungai (lingkungan).

Hal ini tidak sejalan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Sub-Dinas Pengawasan, dimana ia mengatakan bahwa pada dasarnya pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru sudah menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, namun penerapannya belum merata di tiap daerah (kecamatan), dimana setiap kecamatan memiliki persoalan yang berbeda sehingga pembangunan permukiman yang seharusnya memperhatikan aspek ekologi menjadi terabaikan untuk beberapa kecamatan. Seperti yang terdapat di Kecamatan Sail, pembangunan permukiman tidak menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, karena medan permukiman yang berbeda dengan daerah lain. Di Kecamatan Sail kawasan permukiman penduduk tersebar disepanjang pinggiran Sungai Sail yang dinilai tidak ramah lingkungan (wawancara dengan Kepala Sub-Dinas Pengawasan ; 9 Mei 2009).

Disamping harus menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, pembangunan permukiman juga harus menjamin keberlanjutan sosial masyarakat. Pelaksanaan pembangunan permukiman ditujukan sebagai suatu bentuk sarana interaksi sosial, yang akan membentuk karakter serta integrasi dalam komponen masyarakat. Kepekaan dalam interaksi sosial yang dibangun melalui pembangunan permukiman harus berkelanjutan, dalam artian regenerasi kelompok sosial masyarakat kedepannya dapat terpenuhi. Dengan sebuah harapan dimana permukiman penduduk dapat menjadi wadah sekaligus sarana pendukung untuk terjalinnya kehidupan sosial yang kondusif dan integrasi. Masyarakat akan dibentuk berdasarkan kriteria permukiman yang akan menjadi identitas mereka

dalam bersosialisasi. Fenomena yang terjadi di kawasan permukiman Kota Pekanbaru adalah masyarakat mampu berinteraksi dengan baik antar sesama.

Berdasarkan hasil penelitian, lebih dominan masyarakat menyatakan bahwa pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru menjamin keberlanjutan sosial. Masyarakat berinteraksi dengan leluasa, sehingga kondisi kehidupan di lingkungan sosial masyarakat lebih terjalin.

Hal ini yang serupa juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Tata Kota Pekanbaru, yaitu: *"pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru selama ini mendukung terwujudnya solidaritas dan interaksi yang baik antar masyarakat, dengan demikian diharapkan agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat kedepannya dapat tercapai"*

Begitu pula halnya komentar dari informan lainnya, bahwa kesadaran bermasyarakat dalam kehidupan sosial di kawasan permukiman Kota Pekanbaru terhitung tinggi, masyarakat mampu untuk berinteraksi dengan sesamanya dan membentuk suatu komunitas masyarakat sehingga masyarakat dapat menjaga kestabilan aspek sosial yang ada.

Pembangunan permukiman juga harus memperhatikan aspek ekonomi. Dengan prinsip *sustainability* yang diarahkan pada keberlangsungan ekonomi masyarakat, diharapkan agar generasi mendatang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sebagai sebuah proses estafet dari pembangunan ekonomi dimasa kini.

Keberlanjutan ekonomi masyarakat dalam pembangunan permukiman dirasakan belum dapat dipenuhi secara optimal. Karena pemberdayaan ekonomi

masyarakat melalui pembangunan kawasan permukiman yang ideal belum direalisasikan dengan baik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Sub-Dinas Pengawasan, Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru bahwa kondisi pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan permukiman belum dapat diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi yang ada.

Hal yang berbeda dikatakan oleh informan, -dimana pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru menurut pengamatannya dapat dikatakan telah menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat. Masyarakat dikawasan permukiman dengan lebih mandiri membuka usaha-usaha kecil yang dapat menopang kebutuhan hidup mereka. Perluasan daerah permukiman berarti membuka peluang untuk membuka peluang usaha masyarakat. Begitu pula halnya dengan penuturan informan lainnya, bahwa keberlanjutan ekonomi masyarakat dapat terjamin melalui pembangunan permukiman yang ada.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan dalam pembangunan permukiman, serta relevan dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

6.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan

Tugas-tugas pokok Dinas Tata Ruang Dan Bangunan secara terperinci sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengelola dan menyampaikan data yang berkenaan dengan tata kota.
- b. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian perlengkapan dan keuangan.
- c. Membuat perencanaan kerja dibidangnya dan secara teknis melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tata Ruang Dan Bangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana tata ruang kota (RUTRK) serta kegiatan yang menjurus dan berhubungan dengan hal tersebut diatas.
- b. Melakukan kegiatan pengukuran dan pengawasan dalam rangka menyusur perencanaan kota yang terperinci dalam bentuk *blend*.

- c. Menyiapkan rencana peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan penelitian, memberikan petunjuk dan mengarahkan teknik terhadap usaha-usaha pencegahan pengangguan dan pencemaran lingkungan dan lainnya.

6.1.2. Fungsi Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dalam Pembangunan Permukiman

Bagian yang menjalankan fungsi pengawasan pada Dinas Tata Ruang Dan Bangunan adalah Sub-Dinas Pengawasan, yang memiliki tugas pokok yaitu mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pengawasan pembangunan, yang dalam hal ini termasuk pembangunan permukiman yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru.

6.1.3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Dalam Pembangunan Permukiman

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan dalam pembangunan permukiman belum dilaksanakan dengan baik. Kemudian dalam mengukur bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan, penulis menganalisis dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Akurat.

Berdasarkan data yang terhimpun, dapat disimpulkan bahwa akurasi dalam penyediaan informasi yang akurat, terkait pembangunan permukiman guna melakukan usaha-usaha preventif dinilai baik, melalui pelaksanaan fungsi

pengawasan dalam pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru yang dijalankan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan berjalan dengan baik.

b. Tepat Waktu

Dalam pelaksanaan pembangunan permukiman di Kota Pekanbaru, penyediaan informasi-informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu.

c. Objektif dan menyeluruh

Pengawasan pembangunan permukiman yang dijalankan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan telah dilaksanakan dengan objektif dan menyeluruh, dimana pengawasan berjalan dengan ketat dan terdapat pembagian kerja yang proporsional dalam mengawasi pembangunan permukiman di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan yang dilaksanakan memusatkan perhatian pada daerah-daerah dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan berakibat fatal.

e. Realistik dan ekonomis

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan bersifat ekonomis, dengan tidak banyak menghabiskan anggaran untuk implementasi tugas yang telah ditentukan.

f. Realistik secara operasional

Pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan berjalan realistik secara operasional.

g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan selama ini belum terkoordinasi dengan aliran kerja yang ada.

h. Fleksibel

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pembangunan permukiman selama ini bersifat fleksibel. Informasi terkait pembangunan permukiman tersedia kapan saja dibutuhkan, dan tindakan pengawasan dilakukan dengan mempersiapkan tindakan-tindakan perbaikan apabila diperlukan.

i. Berfungsi sebagai petunjuk dan operasional

Berdasarkan informasi yang dihimpun dapat disimpulkan bahwa, fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan belum memiliki petunjuk teknis dan operasional. Oleh karena itu, pengawasan yang seharusnya dapat berfungsi sebagai petunjuk dan operasional, tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

j. Diterima para anggota organisasi

Pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak

terdapat persoalan yang perlu ditangani, seperti persoalan pengawasan internal kepada pegawai yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal.

k. Kualitas hasil pelaksanaan pembangunan permukiman.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kualitas hasil pelaksanaan pembangunan permukiman belum sepenuhnya memperhatikan faktor ekologi dan ekosistem yang ada. Namun, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

6.2. Saran

6.2.1. Kepada Dinas Tata Ruang Dan Bangunan

Dinas Tata Ruang Dan Bangunan diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meningkatkan kinerjanya, serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Khususnya kepada Sub-Dinas Pengawasan, agar lebih meningkatkan fungsi pengawasan secara ketat dan menyeluruh, seperti penempatan aparat yang akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kawasan permukiman hingga tingkat kelurahan/desa. Agar hasil pengawasan lebih objektif dan realistis.
- b. Perlu diadakannya pedoman pelaksanaan pengawasan seperti petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) agar pengawasan yang dijalankan lebih terarah dan teratur.
- c. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru hendaknya meningkatkan kontrol terhadap kinerja bawahan, sehingga peningkatan

kinerja pegawai dapat terwujud dalam mencapai dan mendorong efektivitas kerja.

6.2.2. Kepada masyarakat

- a. Diharapkan masyarakat Kota Pekanbaru lebih preaktif dan ikutserta mengawasi pembangunan permukiman.
- b. Mematuhi dan melaksanakan pembangunan permukiman relevan dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko, 1998, *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, dan Sujarto, Djoko, 1999, *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung.
- Frick, Heinz, 1993, *Rumah Sederhana: Kebijakan Perencanaan dan Konstruksi*, arta.
- Handoko, 1994, *Manajemen Pembangunan*, UGM Press, Yogyakarta
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1995, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Herujito, Yayat, 2001, *Dasar-dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta.
- _____, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Edisi ke-7, Yogyakarta.
- Kast, Fremont, James, 1990, *Organisasi dan Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kataren, Nurlela, 2007, *Administrasi Pembangunan*, USU Press, Medan
- Komaruddin, 1997, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Yayasan REI-PT. Rakasindo, Jakarta.
- Parlindungan, A.P., 1994, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Bagian I, Mandar Maju, Bandung.
- Singarimbun, M. Efendi S., 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, konsep, teori, dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrin, Alvi, 1992, *Asas Pembangunan Perumahan Yang Berwawasan Lingkungan (Suatu Studi Tentang Peraturan Perundang-undangan Pembangunan Perumahan)*, Tesis, Program Pasca Sarjana UNAIR, Surabaya.

Syahrin, Alvi, 1999, *Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-prinsip dan Status Hukumnya)*, Fakultas Hukum USU, Medan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Kebijakan Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (UUPP)

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004.

Sumber On Line

Sambutan Gubri Pada Rakor Regional Klinpraswil se-Sumatera, 4 Januari 2007, berita, www.bangrusli.net, akses tanggal 20 April 2008.

Koran, Artikel, Dokumen Arsip, dan lainnya

M. Hapiz dan Erwan Sani, *Sungai Sail Semakin Menyempit*, **Koran Riau Pos**, Edisi Ahad, tanggal 9 April 2008.